



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM
DAN MULTILATERAL

Gedung Radius Prawiro, Lantai. 6, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Telepon : 021-34831678, Faksimile : 021-34831677, Website : www.fiskal.depkeu.go.id

KETERANGAN PERS

Hasil G20 Ambassadors Briefing Luncheon
Hotel Dharmawangsa, Jakarta, 6 Februari 2013

Para Duta Besar Negara Anggota G20 dan Perwakilan Lembaga Internasional Sepakat Untuk Memperkuat Kerjasama Menghadapai Tantangan Perekonomian Global dan Stabilitas Keuangan

1. *G20 Ambassadors Briefing Luncheon* telah diselenggarakan di Hotel Dharmawangsa Jakarta, pada tanggal 6 Februari 2013. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyampaian hasil-hasil pelaksanaan kerja sama G20 selama tahun 2012 dari sudut pandang dan kepentingan Indonesia serta penyampaian pandangan dan prioritas Indonesia untuk kerja sama G20 di bawah Presidensi Rusia untuk tahun 2013.
2. Wakil Menteri Keuangan II sekaligus *G20 Sherpa* Indonesia berkesempatan membuka acara sekaligus menjelaskan bahwa pembahasan isu dan agenda kerja sama G20 selama Presidensi Meksiko 2012 telah selesai dilaksanakan. Pencapaian tersebut ditandai dengan disepakatinya *Los Cabos Action Plan for Growth and Job Creation* oleh para pemimpin negara anggota G20 pada bulan Juni 2012. Namun demikian, tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh negara anggota G20 masih terus berlanjut, terutama dengan perkembangan ekonomi global yang belum menunjukkan kondisi optimis khususnya ketidakpastian arah pemulihan krisis utang pemerintah di *Eurozone*, kontraksi fiskal di Amerika Serikat dan Jepang. Kondisi ini memaksa seluruh negara anggota G20 untuk dapat terus bekerja sama melalui upaya konsolidasi kebijakan fiskal, moneter maupun kebijakan terkait sasaran pembangunan ke depan. G20 tetap menginginkan tujuan kerja samanya terangkum dalam satu jangkar *Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth (FSSBG)*.
3. Wakil Menteri Keuangan II juga menyampaikan bahwa dalam setiap pertemuan G20 pada Presidensi Meksiko 2012 dan forum/kerjasama internasional lainnya, secara konsisten Indonesia telah memprioritaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan seimbang. Secara spesifik, Indonesia merekomendasikan peningkatan transparansi harga pasar energi dan komoditi yang juga akan dilanjutkan pada masa Presidensi Rusia 2013. Di tengah tantangan yang ada, Indonesia juga berusaha untuk memenuhi komitmennya atas isu efisiensi energi dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi serta kenaikan tarif dasar listrik sebesar 15 %. Terkait dengan beberapa isu prioritas lainnya, Wamenkeu II juga menyatakan bahwa Indonesia juga menaruh perhatian terhadap isu tenaga kerja yang ditunjukkan oleh kedatangan Presiden RI pada rangkaian pertemuan *International Labor Organization* dan kaitannya dengan kesepakatan isu tenaga kerja di dalam forum G20. Selain itu, Indonesia secara aktif melaksanakan dan mendukung investasi kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM
DAN MULTILATERAL

Gedung Radius Prawiro, Lantai. 6, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Telepon : 021-34831678, Faksimile : 021-34831677, Website : www.fiskal.depkeu.go.id

(UMKM) melalui pembiayaan baik dari publik sektor maupun swasta. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan Indonesia yang dikontribusikan dalam *peer learning process* dan sekaligus pemenuhan komitmen Indonesia atas inisiatif keuangan inklusif (*financial inclusion*) dalam forum G20. Di sisi lain yang juga sangat penting adalah pembiayaan infrastruktur yang sangat direkomendasikan oleh Indonesia untuk didiskusikan lebih intensif dalam pertemuan jalur keuangan (*finance track*). Untuk isu perdagangan, Indonesia mempertimbangkan kesepakatan Doha termasuk pertimbangan atas isu proteksionisme. Terkait dengan ketahanan pangan (*food security*), dalam pertemuan antarmenteri pertanian negara anggota G20, disepakati bahwa isu pertanian saat ini tidak hanya perlu dilihat dari harga produk pangan tetapi juga peningkatan kerjasama penyediaan dan distribusinya. Pernyataan Wamenkeu II diakhiri dengan penjelasan bahwa Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam usaha kerjasama dunia untuk memerangi korupsi. Hal ini terbukti pada dedikasi Indonesia tidak hanya pada forum kerjasama G20 tetapi pada forum dan kerjasama internasional terkait lainnya.

4. Pada sesi kedua Kepala Badan Kebijakan Fiskal, memaparkan partisipasi dan isu prioritas Indonesia dalam forum G20 dan APEC tahun 2013, diantaranya pembiayaan infrastruktur, *financial inclusion* dan *food security*. Indonesia menyadari pembiayaan infrastruktur saat ini masih kurang meskipun *World Bank*, *ADB*, *Inter-American Bank* dan *African Development Bank* sudah memberikan kontribusinya. Oleh karena itu, Indonesia tertus berusaha untuk mencari sumber pembiayaan yang baru termasuk melalui jalur *ASEAN Infrastructure Fund* maupun melalui *mekanisme Public Private Partnership* (PPP) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran sektor swasta. Untuk *financial inclusion*, Indonesia fokus kepada tujuan pengentasan kemiskinan, pembangunan aspek sosial dan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan isu prioritas yang diusung oleh Rusia dalam masa keketuaannya pada forum G20 tahun 2013. Sementara terkait dengan isu yang sama dalam forum kerjasama APEC, Indonesia akan fokus kepada upaya mengakomodasi tujuan pengentasan kemiskinan dengan jalur peningkatan pelayanan sektor keuangan dan bank melalui penggunaan teknologi yang lebih handal. Terkait dengan *food security*, Indonesia menyadari bahwa beberapa negara mempunyai kendala dengan produksi pangan dan distribusi serta suplai bagi negara-negara lainnya. Oleh karena itu Indonesia mengusulkan untuk membahas isu tersebut sejalan dengan isu pembangunan global dan juga melalui jalur keuangan (*finance track*).
5. Pada sesi pertanyaan yang pertama, Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Duta Besar Melba Pria, menanyakan posisi dan upaya Indonesia terhadap isu *financial inclusion* G20 yang sudah disepakati tahun 2012 di Meksiko sekaligus menanyakan bagaimana ekspektasi dan upaya Indonesia membawa isu G20 menuju kerjasama bilateral yang kontributif. Terkait dengan pertanyaan isu *financial inclusion*, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Indonesia dalam tahap penyelesaian strategi nasional yang dapat digunakan sebagai *platform* keuangan inklusif yang tidak hanya dapat ditujukan untuk



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM
DAN MULTILATERAL

Gedung Radius Prawiro, Lantai. 6, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Telepon : 021-34831678, Faksimile : 021-34831677, Website : www.fiskal.depkeu.go.id

akses keuangan tetapi juga untuk sistem keamanan sosial (*social security system*), asuransi dan beberapa jenis tabungan yang kesemuanya membutuhkan dukungan dan melibatkan banyak pihak. Kepala BKF menambahkan bahwa Indonesia dapat belajar dari Meksiko terutama terkait implementasi *branchless banking* dan *agent banking* yang menjadi *role model* di Amerika bagian Selatan. Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan II menjelaskan bahwa isu yang sudah dielaborasi dalam kerjasama bilateral, multilateral, dan regional adalah pembangunan infrastruktur termasuk isu pembiayaannya. ASEAN+3 telah menyepakati beberapa inisiatif yang mendukung pembangunan infrastruktur melalui konektivitas kewilayahan. Inisiatif tersebut dapat menjadi pertimbangan G20 dalam peningkatan pembangunan infrastruktur.

6. Dalam presentasinya, Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Duta Besar Melba Pria, menyampaikan bahwa Presidensi Meksiko 2012 mempunyai lima isu prioritas yang implementasinya masih terus berjalan yaitu: 1) peningkatan pendanaan IMF untuk pemulihan ekonomi dari krisis; 2) keuangan inklusif (*financial inclusion*) yang berfokus kepada pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen; 3) perdagangan internasional yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja baru; 4) ketahanan pangan (*food security*) dan penyelesaian permasalahan volatilitas harga komoditi melalui investasi infrastruktur pertanian, peningkatan kesejahteraan petani serta penyelenggaraan riset dan analisis; 5) mendorong pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup (*green growth*).
7. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Duta Besar Mikhail Galuzin, dalam presentasinya menyampaikan bahwa prioritas utama Presidensi Rusia 2013 ditujukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja melalui upaya peningkatan investasi, transparansi pasar, dan penyusunan regulasi yang efektif. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut isu tradisional yang esensial yang akan menjadi pembahasan yaitu stabilisasi ekonomi global, kerangka perjanjian untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan seimbang (FSSBG), reformasi regulasi keuangan dan moneter, stabilitas pasar ekonomi global, pembangunan internasional, peningkatan perdagangan internasional dan anti korupsi, ditambah dengan dua isu baru, yaitu pinjaman publik dan sistem pengelolaan utang negara, serta sinergi antara sektor keuangan dan tenaga kerja. Disampaikan pula bahwa *Leader's Summit G20* akan dilakukan di *Constantin Palace St. Petersburg* pada tanggal 5-6 September 2013 dan direncanakan akan diisi dengan beberapa substansi APEC.
8. Pada sesi pertanyaan yang kedua, Duta Besar Jerman, Duta Besar Georg Witschel, menanyakan hal terkait dengan sumber pendanaan kegiatan *financial inclusion* dan pertimbangan defisit-surplus serta kebijakan fiskal Indonesia atas isu *framework G20*. Pada sesi yang sama, Duta Besar Inggris, Duta Besar Mark Canning, menanyakan pandangan Indonesia atas isu reformasi *international financial architecture* terutama



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM
DAN MULTILATERAL

Gedung Radius Prawiro, Lantai. 6, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Telepon : 021-34831678, Faksimile : 021-34831677, Website : www.fiskal.depkeu.go.id

untuk IMF. Sementara perwakilan Kedutaan AS menanyakan beberapa hal yaitu; bagaimana upaya menarik perhatian pasar untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur; bagaimana peran bank sentral dalam hal regulasi penggunaan produk keuangan; dan bagaimana upaya peningkatan infrastruktur teknologi pangan yang dapat diakses oleh petani kecil.

9. Respon Wakil Menteri Keuangan II atas beberapa pertanyaan sesi kedua menekankan kepada peningkatan kapasitas, perencanaan dan desain kegiatan yang matang sekaligus pembelajaran dari pengalaman negara-negara lain. Wakil Menteri Keuangan II menambahkan bahwa sumber pendanaan yang ada saat ini masih membutuhkan dukungan tambahan selain dari institusi donor, juga yang tidak kalah penting adalah melalui pasar obligasi. Di sisi lain beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan (*food security*) selain pembiayaan, adalah kerjasama antara petani kecil dan pengusaha lahan pertanian besar dan inisiatif pengenalan pengetahuan dan teknologi yang terkait. Terkait dengan reformasi IMF, Indonesia sangat mendukung GDP *purchasing power parity* (PPP) sebagai *basic formula*.
10. Respon Kepala Badan Kebijakan Fiskal terhadap pertanyaan sesi kedua utamanya terkait dengan *sovereign wealth fund* yang dapat digunakan untuk akses pembiayaan infrastruktur selain beberapa konsep *Public Private Partnership (PPP)* dan juga *ASEAN Infrastructure Fund*. Di sisi lain, Indonesia juga sudah mempertimbangkan upaya keseimbangan kebijakan moneter dan fiskal dalam hal mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dunia yang masih lambat. Terkait dengan isu reformasi regulasi, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia saling bekerjasama dalam memastikan prinsip-prinsip dasar keuangan inklusif yang dapat diimplementasikan termasuk untuk meningkatkan akses pelayanan keuangan kepada masyarakat umum.
11. Menteri Keuangan menjelaskan empat kebijakan fiskal utama Indonesia tahun 2013 yaitu menjaga kesehatan keuangan dengan pertimbangan utama pada defisit-surplus APBN; menjaga struktur keuangan yang sehat dengan indikator rasio utang terhadap GDP; mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak dan non pajak; serta peningkatan kualitas belanja negara. Menteri Keuangan menambahkan bahwa target jangka panjang pembangunan ekonomi Indonesia menyatu di dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (2011-2025) yang di dalamnya juga mengakomodasi pembangunan sektor-sektor prioritas Indonesia termasuk ketahanan pangan, pendidikan, infrastruktur, dan beberapa lainnya. Khusus terkait dengan pendanaan infrastruktur, Indonesia akan terus menyempurnakan mekanisme PPP untuk peningkatan investasi swasta.
12. Pada sesi penutup, Menteri Keuangan menjelaskan pandangannya terkait agenda G20 2013 di bawah Presidensi Rusia. Enam area dan upaya yang dapat dilakukan oleh G20 adalah: 1) melanjutkan implementasi komitmen yang sudah disepakati di Los Cabos,



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM
DAN MULTILATERAL

Gedung Radius Prawiro. Lantai. 6, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Telepon : 021-34831678, Faksimile : 021-34831677, Website : www.fiskal.depkeu.go.id

Meksiko, sekaligus mendukung prioritas Rusia pada isu tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja; 2) mendukung momentum pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang dengan salah satunya melalui upaya penguatan pembiayaan di bidang infrastruktur; 3) mendukung isu global ekonomi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, reformasi IMF, dan peningkatan regulasi keuangan terus dilanjutkan untuk dibahas dalam pertemuan G20; 4) mendukung G20 untuk melakukan konsolidasi strategi inklusif dengan meningkatkan *outreach program* dengan melibatkan beberapa negara perwakilan kerjasama kewilayahan internasional sekaligus meneruskan keterlibatan institusi internasional seperti UN, IMF dan *World Bank*, serta memperkuat regulasi keuangan; 5) membangun konsultasi yang efektif dengan masyarakat sipil yang akan membantu G20 untuk meningkatkan kualitas komunikasi sosial sekaligus membangun kepedulian terhadap kontribusi G20 bagi kesejahteraan masyarakat global; 6) mendorong isu regulasi keuangan untuk dibahas secara lebih intensif dalam pertemuan G20 setelah *Financial Stability Board* (FSB) menyelesaikan laporannya. Menteri Keuangan selanjutnya menyebutkan tiga prioritas agenda yang akan diusung oleh Indonesia pada masa Presidensi Rusia 2013 yaitu: 1) Pembiayaan infrastruktur; 2) Regulasi Keuangan Global termasuk isu yang terkait dalam *Financial Action Task Force* (FATF) dan *Financial Stability Board* (FSB); 3) *Global partnership* untuk isu keuangan inklusif (*financial inclusion*).

13. Menteri Keuangan mengharapkan *G20 Ambassadors Briefing Luncheon* 2013 dapat menjadi awal peningkatan kerjasama untuk menciptakan koordinasi kebijakan dalam rangka menghadapi tantangan perekonomian global dan stabilitas keuangan menuju pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal
Telp. (021) 34831673
Faks. (021) 34831677
